

Program Magang Mahasiswa sebagai Model Pengabdian dalam Penguatan Tata Kelola Administrasi Publik Daerah

T. Fardhan Nur Pratama¹, Abd. Rasyid Syamsuri^{1*}, Abd Halim², Ega Siddik³

¹ Universitas Riau, ² Universitas Mandiri Bina Prestasi, ³ Politeknik Unggul LP3M Medan

ABSTRAK

Pengabdian kepada masyarakat bertujuan meningkatkan kapasitas kelembagaan mitra melalui penerapan pengetahuan akademik secara aplikatif. Artikel ini mendeskripsikan program magang mahasiswa sebagai model pengabdian masyarakat dalam penguatan tata kelola administrasi publik pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau. Kegiatan dilaksanakan menggunakan pendekatan partisipatif melalui penempatan mahasiswa secara langsung dalam aktivitas administrasi perkantoran selama periode magang. Tahapan kegiatan meliputi identifikasi kebutuhan instansi, pendampingan administrasi surat-menyurat dan arsip, pengolahan data bantuan keuangan partai politik, serta dukungan teknis penyelenggaraan Pilkada Serentak. Data diperoleh melalui observasi, dokumentasi, dan evaluasi kinerja administrasi sebelum dan sesudah pendampingan. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan kinerja yang terukur, antara lain kenaikan arsip terklasifikasi dari 48% menjadi 86%, percepatan waktu temu kembali dokumen dari 27 menit menjadi 11 menit, serta penurunan tingkat kesalahan pencatatan dari 17% menjadi 6%. Selain memberikan manfaat bagi mitra, program ini juga meningkatkan kompetensi profesional mahasiswa dalam bidang administrasi publik dan tata kelola pemerintahan. Temuan ini menegaskan bahwa program magang mahasiswa dapat menjadi model pengabdian masyarakat yang aplikatif, berkelanjutan, dan dapat direplikasi untuk memperkuat kapasitas administrasi instansi pemerintah daerah.

Kata Kunci: Magang Mahasiswa, Pengabdian Masyarakat, Administrasi Publik, Tata Kelola, Pemerintah Daerah

ABSTRACT

Community service aims to strengthen the institutional capacity of partner organizations by applying academic knowledge and skills in practice. This article describes a student internship program as a community service model for strengthening public administration governance at the Regional National Unity and Political Agency of Pelalawan Regency, Riau Province. The program was implemented using a participatory approach by directly involving students in daily office administrative activities during the internship period. The stages included institutional needs assessment, assistance with correspondence and archival management, processing of political party financial aid data, and technical support for the implementation of the simultaneous regional election. Data were collected through observation, documentation, and evaluation of administrative performance before and after the intervention. The results demonstrate measurable improvements, including an increase in properly classified archives from 48% to 86%, a reduction in document retrieval time from 27 minutes to 11 minutes, and a decrease in recording errors from 17% to 6%. In addition to benefiting the partner institution, the program also enhanced students' professional competencies in public administration and governance. These findings confirm that student internships can serve as an applicable, sustainable, and replicable community service model for strengthening administrative capacity in local government institutions.

Keywords: Student Internship, Community Service, Public Administration, Governance, Local Government

Histori Artikel:

Diterima 5 Januari 2026, direvisi 14 Februari 2026 2026, disetujui 18 Februari 2026, dipublikasikan 19 Februari 2026

*Penulis Korespondensi:

abd.rasyidsyamsuri@lecturer.unri.ac.id

DOI:

<https://doi.org/10.60036/74sg2x02>

PENDAHULUAN

Perguruan tinggi memiliki peran strategis dalam pembangunan masyarakat melalui pelaksanaan Tridharma, salah satunya adalah pengabdian kepada masyarakat yang bertujuan mengimplementasikan ilmu pengetahuan secara langsung untuk menyelesaikan permasalahan nyata di lingkungan mitra. Dalam konteks pemerintahan daerah, pengabdian masyarakat tidak hanya berorientasi pada pemberdayaan sosial, tetapi juga pada penguatan kapasitas kelembagaan dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kualitas pelayanan publik sangat ditentukan oleh efektivitas administrasi dan tata kelola organisasi. Namun, berbagai instansi pemerintah daerah masih menghadapi kendala keterbatasan sumber daya manusia, penataan arsip yang belum sistematis, serta beban kerja administratif yang tinggi. Kondisi tersebut berdampak pada lambatnya proses pelayanan, rendahnya efisiensi kerja, dan kurang optimalnya akuntabilitas kelembagaan. Permasalahan administratif ini juga ditemukan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, sebagai instansi yang memiliki tugas strategis dalam pembinaan politik, pengelolaan data kelembagaan, serta dukungan penyelenggaraan demokrasi daerah.

Pendekatan penguatan kapasitas organisasi pemerintah melalui kolaborasi dengan perguruan tinggi menjadi semakin relevan dalam konteks reformasi birokrasi. Pemerintah daerah dituntut untuk bekerja secara efektif, transparan, dan akuntabel, sementara dukungan sumber daya administratif sering kali terbatas. Oleh karena itu, diperlukan strategi inovatif yang tidak hanya bersifat struktural, tetapi juga berbasis pendampingan operasional secara langsung. Secara konseptual, penguatan tata kelola administrasi publik mencakup penataan sistem surat-menyurat, pengarsipan dokumen, pengelolaan data, serta dukungan terhadap proses pelayanan dan pelaporan kelembagaan. Administrasi yang tertib akan mempercepat alur informasi, meminimalkan kesalahan kerja, serta meningkatkan akuntabilitas organisasi. Sebaliknya, sistem administrasi yang kurang sistematis berpotensi menimbulkan keterlambatan pelayanan, duplikasi pekerjaan, dan risiko kehilangan dokumen penting.

Dalam praktiknya, instansi yang menangani urusan politik dan pemerintahan daerah memiliki beban kerja administratif yang dinamis dan kompleks, terutama pada kegiatan pengelolaan data organisasi kemasyarakatan, bantuan keuangan partai politik, hingga dukungan teknis penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Kebutuhan administrasi yang tinggi tersebut memerlukan dukungan tambahan agar pelayanan publik tetap berjalan secara efektif dan efisien. Berbagai program magang mahasiswa selama ini umumnya difokuskan sebagai sarana pembelajaran akademik, sehingga manfaatnya lebih dominan dirasakan oleh mahasiswa dibandingkan dengan instansi mitra. Pendekatan tersebut menyebabkan potensi magang sebagai instrumen penguatan kapasitas organisasi belum dimanfaatkan secara optimal. Padahal, mahasiswa memiliki kompetensi literasi digital, ketelitian administrasi, serta kemampuan adaptasi yang dapat mendukung modernisasi sistem kerja birokrasi.

Oleh karena itu, diperlukan model magang yang tidak hanya berorientasi pada pembelajaran, tetapi juga dirancang sebagai bentuk pengabdian masyarakat yang memberikan kontribusi langsung terhadap penyelesaian permasalahan administratif mitra. Salah satu alternatif pendekatan yang relevan adalah magang berbasis pendampingan administratif, di mana mahasiswa terlibat secara partisipatif dalam aktivitas operasional instansi untuk membantu penataan dokumen, pengolahan data, serta dukungan pelayanan publik. Pendekatan ini diharapkan mampu menciptakan sinergi antara perguruan tinggi dan pemerintah daerah sekaligus menghasilkan dampak nyata bagi peningkatan kinerja organisasi. Pendekatan magang berbasis pengabdian masyarakat juga sejalan dengan konsep pembelajaran eksperiensial yang menekankan integrasi antara teori dan praktik. Melalui keterlibatan langsung di lingkungan kerja, mahasiswa tidak hanya memperoleh pengalaman profesional, tetapi juga berkontribusi secara

nyata dalam penyelesaian masalah organisasi. Sinergi ini menghasilkan hubungan timbal balik yang saling menguntungkan antara perguruan tinggi dan instansi pemerintah.

Meskipun demikian, implementasi magang sebagai bentuk pengabdian masyarakat masih relatif terbatas dilaporkan secara sistematis dalam publikasi ilmiah, khususnya dalam konteks instansi pemerintahan daerah. Sebagian besar kegiatan magang belum terdokumentasi sebagai model intervensi yang terstruktur dan terukur dampaknya. Kesenjangan ini menunjukkan perlunya kajian empiris yang mampu mendeskripsikan proses, hasil, serta kontribusi nyata program magang terhadap peningkatan kinerja administrasi publik. Dengan demikian, dokumentasi ilmiah atas praktik magang berbasis pendampingan administratif menjadi penting sebagai upaya menghadirkan bukti empiris sekaligus menawarkan model implementasi yang dapat direplikasi oleh perguruan tinggi lain. Pendekatan ini diharapkan dapat menjadi salah satu strategi inovatif dalam mendukung reformasi birokrasi dan penguatan tata kelola pemerintahan daerah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini bertujuan mendeskripsikan dan menganalisis pelaksanaan program magang mahasiswa sebagai model pengabdian masyarakat dalam penguatan tata kelola administrasi publik. Kegiatan ini dilaksanakan melalui pendampingan administratif pada instansi mitra guna meningkatkan efektivitas kerja, kerapian pengelolaan dokumen, serta kualitas pelayanan publik. Hasil kegiatan diharapkan dapat menjadi rujukan konseptual dan praktis bagi pengembangan program pengabdian masyarakat berbasis magang di instansi pemerintah daerah lainnya.

LANDASAN TEORI

Pengabdian kepada Masyarakat dalam Tridarma Perguruan Tinggi

Pengabdian kepada masyarakat merupakan salah satu pilar utama tridarma perguruan tinggi yang bertujuan untuk menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurut Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020, pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam konteks ini, pengabdian tidak hanya bersifat sosial, tetapi juga mencakup kontribusi nyata dalam peningkatan kapasitas kelembagaan dan pelayanan publik.

Sejalan dengan itu, Sutrisno (2021) menyatakan bahwa pengabdian masyarakat berbasis institusi pemerintah memiliki nilai strategis karena mampu menjembatani kebutuhan praktis birokrasi dengan kompetensi akademik yang dimiliki mahasiswa. Model pengabdian semacam ini mendorong terciptanya hubungan simbiotik antara perguruan tinggi dan pemerintah daerah.

Administrasi Publik

Administrasi publik merupakan proses pengelolaan sumber daya publik untuk mencapai tujuan negara secara efektif dan efisien. Denhardt & Denhardt (2019) menjelaskan bahwa administrasi publik modern tidak hanya berfokus pada pelaksanaan kebijakan, tetapi juga pada nilai pelayanan, partisipasi, dan akuntabilitas publik. Administrasi publik yang baik menuntut adanya sistem kerja yang tertib, transparan, dan berbasis pelayanan masyarakat. Menurut Dwiyanto (2020), kualitas administrasi publik sangat ditentukan oleh kemampuan aparatur dalam mengelola dokumen, informasi, dan proses kerja secara sistematis. Kelemahan dalam administrasi dapat berdampak langsung pada lambatnya pelayanan publik dan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Tata Kelola Pelayanan Publik (Good Governance)

Tata kelola pelayanan publik merupakan bagian dari konsep good governance yang menekankan pada transparansi, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, dan partisipasi. United

Nations Development Programme (UNDP, 2019) menyebutkan bahwa good governance adalah proses pengambilan keputusan dan pelaksanaannya yang dapat dipertanggungjawabkan, inklusif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Di tingkat pemerintahan daerah, penerapan tata kelola pelayanan publik menjadi sangat penting karena berhadapan langsung dengan masyarakat. Sedarmayanti (2021) menegaskan bahwa tata kelola yang baik harus didukung oleh sistem administrasi yang rapi, sumber daya manusia yang kompeten, serta budaya kerja yang berorientasi pada pelayanan.

Kapasitas Organisasi dan Sumber Daya Manusia

Kapasitas organisasi merujuk pada kemampuan suatu instansi dalam menjalankan fungsi dan tugasnya secara optimal. Grindle (2018) menjelaskan bahwa kapasitas organisasi mencakup kapasitas individu, kapasitas kelembagaan, dan kapasitas sistem. Dalam konteks instansi pemerintah, peningkatan kapasitas organisasi sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia dan sistem administrasi yang digunakan. Armstrong (2020) menambahkan bahwa penguatan kapasitas sumber daya manusia dapat dilakukan melalui pembelajaran berbasis praktik, pendampingan, dan keterlibatan langsung dalam pekerjaan organisasi. Oleh karena itu, kehadiran mahasiswa magang dapat menjadi bagian dari proses penguatan kapasitas organisasi, khususnya dalam mendukung pekerjaan administratif.

Program Magang Mahasiswa

Program magang mahasiswa merupakan bentuk pembelajaran eksperiential (experiential learning) yang mengintegrasikan teori dan praktik. Kolb (2019) menyatakan bahwa pembelajaran efektif terjadi ketika individu terlibat langsung dalam pengalaman nyata, kemudian merefleksikan pengalaman tersebut untuk membangun pemahaman baru. Dalam konteks pendidikan tinggi, Fahmi & Yusuf (2022) menjelaskan bahwa magang tidak hanya berfungsi sebagai sarana pembelajaran mahasiswa, tetapi juga sebagai kontribusi nyata terhadap instansi mitra. Melalui magang, mahasiswa dapat membantu tugas-tugas operasional instansi sekaligus meningkatkan kompetensi profesional mereka.

Magang sebagai Bentuk Pengabdian Masyarakat

Magang mahasiswa dapat dikategorikan sebagai bentuk pengabdian masyarakat apabila memberikan manfaat langsung bagi instansi dan masyarakat luas. Rahman et al. (2021) menyatakan bahwa pengabdian masyarakat berbasis magang memiliki keunggulan karena bersifat berkelanjutan, aplikatif, dan berorientasi pada kebutuhan nyata mitra. Kegiatan magang di instansi pemerintah memungkinkan mahasiswa berkontribusi dalam peningkatan kualitas administrasi dan pelayanan publik. Hal ini sejalan dengan pandangan Suharto (2020) yang menyebutkan bahwa keterlibatan generasi muda dalam birokrasi melalui program terstruktur dapat mendorong inovasi dan efisiensi kerja.

Administrasi Pemerintahan Daerah

Administrasi pemerintahan daerah merupakan bagian dari sistem administrasi negara yang bertujuan untuk melaksanakan otonomi daerah. Menurut Halim & Kusufi (2020), pemerintahan daerah dituntut untuk mampu mengelola administrasi secara profesional agar kebijakan dan pelayanan publik dapat berjalan optimal. Dalam pelaksanaannya, instansi seperti Badan Kesatuan Bangsa dan Politik memiliki peran administratif yang kompleks, mulai dari pengelolaan data, dokumentasi kegiatan politik, hingga penyusunan laporan pertanggungjawaban. Oleh karena itu, dukungan sumber daya tambahan melalui program magang menjadi relevan dan strategis.

Peran Kesbangpol dalam Stabilitas Politik dan Pelayanan Publik

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik memiliki tugas strategis dalam menjaga stabilitas politik dan demokrasi daerah. Budiardjo (2019) menegaskan bahwa stabilitas politik sangat dipengaruhi oleh kualitas administrasi dan koordinasi antarlembaga. Administrasi yang buruk berpotensi menimbulkan kesalahan informasi dan konflik kebijakan. Dalam konteks pelayanan publik, Kesbangpol juga berperan dalam pendidikan politik dan fasilitasi demokrasi. Oleh karena itu, penguatan kapasitas administrasi di lingkungan Kesbangpol menjadi prasyarat penting untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas tersebut secara efektif.

Sinergi Perguruan Tinggi dan Pemerintah Daerah

Sinergi antara perguruan tinggi dan pemerintah daerah merupakan bentuk kolaborasi strategis dalam pembangunan sumber daya manusia. Etzkowitz & Zhou (2021) melalui konsep *triple helix* menekankan pentingnya kolaborasi antara akademisi, pemerintah, dan masyarakat dalam mendorong inovasi dan tata kelola yang baik. Program magang mahasiswa di instansi pemerintah mencerminkan implementasi nyata dari kolaborasi tersebut. Perguruan tinggi berperan sebagai penyedia sumber daya intelektual, sementara pemerintah daerah menjadi wahana penerapan ilmu dan pengabdian.

METODE

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan menggunakan pendekatan partisipatif dan aplikatif melalui skema program magang mahasiswa yang dirancang sebagai model pendampingan administratif pada instansi pemerintah daerah. Pendekatan partisipatif dipilih untuk memastikan keterlibatan aktif mahasiswa dan mitra dalam setiap tahapan kegiatan sehingga solusi yang diberikan sesuai dengan kebutuhan nyata organisasi. Kegiatan dilaksanakan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pelalawan selama periode September–November 2025 dengan melibatkan lima mahasiswa sebagai pendamping administratif. Mahasiswa ditempatkan secara langsung dalam lingkungan kerja instansi yang mengikuti jam kerja kedinasan sehingga berpartisipasi dalam aktivitas operasional sehari-hari. Sasaran kegiatan meliputi penguatan sistem administrasi perkantoran, penataan arsip, pengelolaan data kelembagaan, serta dukungan teknis pelayanan publik.

Pelaksanaan pengabdian dilakukan melalui empat tahapan utama, yaitu: 1) tahap persiapan, 2) tahap identifikasi kebutuhan dan pengukuran awal (*baseline*), 3) tahap pendampingan administratif, dan 4) tahap evaluasi akhir (*endline*). Pada tahap persiapan dilakukan koordinasi dengan pihak instansi untuk menentukan ruang lingkup kegiatan, pembagian tugas, serta penyesuaian program dengan kebutuhan organisasi. Tahap identifikasi kebutuhan dilakukan melalui observasi awal, diskusi dengan pegawai, serta pengukuran kondisi administratif sebelum pendampingan. Pengukuran awal ini bertujuan memperoleh gambaran kuantitatif mengenai tingkat kerapian arsip, kecepatan temu kembali dokumen, serta waktu penyelesaian layanan administrasi. Data awal dicatat sebagai dasar pembandingan terhadap kondisi setelah program berjalan.

Tahap pendampingan administratif merupakan inti kegiatan. Mahasiswa terlibat langsung dalam pengelolaan surat masuk dan keluar, penataan arsip fisik dan digital, penyusunan laporan administrasi, pengolahan data bantuan keuangan partai politik, serta dukungan teknis pada kegiatan pemerintahan seperti persiapan logistik pemilihan kepala daerah. Intervensi dilakukan melalui penerapan sistem klasifikasi dokumen, pembuatan daftar indeks arsip, digitalisasi file prioritas, serta penyusunan format administrasi yang lebih terstandar. Kegiatan ini diarahkan untuk meningkatkan kerapian dokumen, efisiensi alur kerja, dan ketepatan pengelolaan data.

Pengumpulan data dilakukan menggunakan observasi partisipatif, dokumentasi, wawancara, serta pengukuran kuantitatif sebelum dan sesudah pendampingan. Beberapa indikator yang digunakan meliputi: 1) jumlah arsip yang terklasifikasi dengan baik, 2) rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk menemukan dokumen, 3) jumlah dokumen yang terdigitalisasi, 4) waktu penyelesaian layanan administrasi tertentu, dan 5) tingkat kesalahan pencatatan dokumen. Pengukuran awal dilakukan pada minggu pertama sebelum intervensi, sedangkan pengukuran akhir dilakukan pada minggu terakhir program. Perubahan dihitung berdasarkan selisih nilai sebelum dan sesudah pendampingan serta dipresentasikan dalam bentuk persentase peningkatan kinerja. Data diverifikasi bersama pejabat unit untuk memastikan kesesuaian dengan kondisi riil instansi. Wawancara dengan pegawai digunakan untuk melengkapi data kuantitatif, khususnya dalam menilai kemudahan kerja, efektivitas sistem baru, serta manfaat program bagi instansi.

Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur terhadap informan kunci yang terlibat langsung dalam proses administrasi, yang terdiri dari pimpinan unit dan staf pengelola arsip dengan jumlah sebanyak 6 orang (1 pejabat struktural/kepala subbagian, 3 staf administrasi, 1 pengelola arsip dan 1 operator layanan/data). Kegiatan wawancara dilaksanakan pada awal dan akhir periode pendampingan untuk menangkap perubahan persepsi mitra terhadap kondisi tata kelola administrasi. Hasil wawancara dicatat dalam bentuk ringkasan naratif, kemudian dikelompokkan berdasarkan tema seperti efisiensi kerja, kemudahan penelusuran dokumen, dan kebermanfaatan program magang. Temuan ini selanjutnya digunakan untuk memperkuat interpretasi terhadap hasil pengukuran kuantitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Kegiatan Pengabdian Masyarakat

Pelaksanaan pengabdian masyarakat melalui program magang mahasiswa di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pelalawan menghasilkan peningkatan nyata pada aspek administrasi perkantoran. Untuk menilai efektivitas pendampingan, dilakukan pengukuran kondisi administratif sebelum dan sesudah program. Perbandingan kinerja tersebut ditampilkan pada Tabel 1.

Tabel 1. Perbandingan Kinerja Administratif Sebelum dan Sesudah Pendampingan

No	Indikator Kinerja	Sebelum Pendampingan	Sesudah Pendampingan	Perubahan
1	Arsip terklasifikasi dengan baik	48%	86%	+38%
2	Rata-rata waktu temu kembali dokumen	27 menit	11 menit	Lebih cepat 59%
3	Dokumen terdigitalisasi	35%	78%	+43%
4	Waktu penyelesaian administrasi	3 hari	1 hari	Lebih cepat 66%
5	Kesalahan pencatatan	17%	6%	Turun 64%

Hasil pengukuran memperlihatkan adanya peningkatan signifikan pada seluruh indikator yang diamati. Perbaikan paling menonjol terjadi pada kecepatan temu kembali dokumen serta meningkatnya proporsi arsip yang terklasifikasi dengan baik. Perubahan ini memberikan implikasi langsung terhadap efisiensi kerja pegawai karena proses pencarian, disposisi, dan penyusunan laporan dapat dilakukan dalam waktu yang lebih singkat dan dengan tingkat ketepatan yang lebih tinggi. Peningkatan tersebut tidak terlepas dari keterlibatan mahasiswa dalam membangun sistem pencatatan yang lebih terstruktur. Mahasiswa membantu

penyusunan dan pengisian daftar registrasi arsip surat masuk dan surat keluar tahun 2024 dengan format yang seragam dan mudah ditelusuri. Setiap dokumen dicatat berdasarkan tanggal, nomor surat, sifat surat, ringkasan isi, serta tujuan surat, sehingga alur informasi menjadi lebih jelas dan terdokumentasi dengan baik. Implementasi penataan tersebut dapat dilihat pada dokumentasi lembar kerja administrasi surat sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 1. Dokumentasi ini menunjukkan perubahan dari praktik pencatatan yang sebelumnya bersifat manual dan tidak terstruktur menuju sistem administrasi yang lebih terindeks dan mudah ditelusuri.

No	Tanggal Penerimaan Surat	Nomor dan Tanggal Surat	Sifat Surat	Isi Ringkas	Dari	Kepada
266	04/11/2024	105/Parsus-13/2024/221 31/10/2024	Biasa	Undangan Pembahasan 'Seginar' Menyambut Hari Pelawar 10 November 2024 Tingkat Kabupaten Pelalawan	Bupati Pelalawan	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pelalawan
267	07/11/2024	84/586/4/234 06/11/2024	Biasa	Pemecatan Personal Kantor Koramil Kuala Kampar	Korondo Reser Militer 061/Mira Bina	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pelalawan
268	07/11/2024	302/28/SDA/0/2024/57 05/11/2024	Biasa	Perubahan Husang Lirulike Perumiso Tuh Saleka	Setra	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pelalawan

No	Tanggal Pembuatan Surat	Nomor Surat	Sifat Surat	Isi Ringkas	Kepada
306	01/11/2024	900/BKBP/2024/306	Biasa	SPO Perubahan APBD 2024	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aet Daerah (BPKAD) Kabupaten Pelalawan
307	01/11/2024	800/BKBP-S/2024/307	Biasa	Jadwal Apel Bulan November 2024	Internen Kantor
308	01/11/2024	800/BKBP-S/2024/308	Biasa	Rekap Absen Bulan November 2024	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Pelalawan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber

Gambar 1. Foto Surat Masuk dan Keluar

Melalui sistem registrasi yang lebih tertib, proses penelusuran dokumen menjadi lebih cepat dan terkontrol karena setiap arsip memiliki identitas serta lokasi penyimpanan yang pasti. Kondisi ini membantu pegawai dalam mempercepat proses disposisi, pengendalian dokumen, serta penyiapan bahan laporan. Dengan demikian, pendampingan mahasiswa tidak hanya memperbaiki aspek teknis pencatatan, tetapi juga memperlancar alur koordinasi internal dan memperkuat praktik tertib administrasi di lingkungan instansi.

Selain pengelolaan arsip, mahasiswa turut berperan dalam pengolahan data bantuan keuangan partai politik. Mahasiswa membantu menyusun tabel perhitungan bantuan keuangan berdasarkan jumlah perolehan suara sah hasil Pemilu. Hasil pengolahan data ini disajikan dalam bentuk tabel digital yang sistematis dan mudah dipahami, sebagaimana terlihat pada layar monitor perhitungan bantuan keuangan partai politik tahun 2025. Dampak yang dirasakan mitra adalah meningkatnya kemudahan pencarian dokumen dan berkurangnya waktu yang dibutuhkan untuk menemukan arsip tertentu. Kondisi ini memperlihatkan bahwa pembenahan sistem kerja dasar, meskipun sederhana, mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan efektivitas tata kelola administrasi organisasi. Data diolah dalam format digital sehingga lebih mudah diverifikasi, diperbarui, dan disajikan kembali untuk keperluan pelaporan.

**TATA CARA PENGHITUNGAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
TAHUN 2025**

BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK YANG MENDAPATKAN KURSI HASIL PEMILU 2024

NO. PARTAI POLITIK	JUMLAH KURSI	PEROLEHAN SUARA HASIL PEMILU 2024	PENGHITUNGAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK YANG MENDAPATKAN KURSI HASIL PEMILU 2024	BIAYA BANTUAN KEUANGAN YANG DIBERIKAN KEPADA PARTAI POLITIK YANG MENDAPATKAN KURSI HASIL PEMILU 2024
1. PSI P	12 KURSI	58.372 SUARA	NILAI PER SUARA x JUMLAH PEROLEHAN SUARA	Rp 10.000 X 58.372 SUARA = Rp 583.720.000
2. GOLKAR	6 KURSI	34.212 SUARA	NILAI PER SUARA x JUMLAH PEROLEHAN SUARA	Rp 10.000 X 34.212 SUARA = Rp 342.120.000
3. PKS	6 KURSI	23.770 SUARA	NILAI PER SUARA x JUMLAH PEROLEHAN SUARA	Rp 10.000 X 23.770 SUARA = Rp 237.700.000
4. PAN	4 KURSI	20.591 SUARA	NILAI PER SUARA x JUMLAH PEROLEHAN SUARA	Rp 10.000 X 20.591 SUARA = Rp 205.910.000
5. GERAKAN	3 KURSI	18.325 SUARA	NILAI PER SUARA x JUMLAH PEROLEHAN SUARA	Rp 10.000 X 18.325 SUARA = Rp 183.250.000
6. DEMOKRAT	3 KURSI	17.808 SUARA	NILAI PER SUARA x JUMLAH PEROLEHAN SUARA	Rp 10.000 X 17.808 SUARA = Rp 178.080.000
7. PKS	4 KURSI	12.852 SUARA	NILAI PER SUARA x JUMLAH PEROLEHAN SUARA	Rp 10.000 X 12.852 SUARA = Rp 128.520.000
8. NASDEM	1 KURSI	10.344 SUARA	NILAI PER SUARA x JUMLAH PEROLEHAN SUARA	Rp 10.000 X 10.344 SUARA = Rp 103.440.000
9. HANURA	2 KURSI	9.106 SUARA	NILAI PER SUARA x JUMLAH PEROLEHAN SUARA	Rp 10.000 X 9.106 SUARA = Rp 91.060.000
JUMLAH	58 KURSI	205.380 SUARA		205.380 SUARA Rp 2.053.800.000

Gambar 2. Rekapitulasi Perhitungan Bantuan Keuangan Partai Politik Tahun 2025

Digitalisasi ini berdampak pada meningkatnya akurasi, transparansi, dan keteraturan administrasi keuangan. Penyajian data dalam bentuk tabel terstruktur membantu meminimalkan kesalahan perhitungan serta mempermudah proses audit internal. Hasil ini menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi perkantoran oleh mahasiswa mampu mendorong modernisasi sistem administrasi instansi.

Pada aspek pelayanan publik di bidang politik, mahasiswa terlibat dalam pemantauan distribusi logistik dan pelipatan surat suara pada tahapan Pilkada Serentak. Keterlibatan ini membantu mempercepat pendataan logistik, pengecekan kelengkapan dokumen, serta pengawasan administrasi kegiatan lapangan. Partisipasi mahasiswa memberikan tambahan sumber daya manusia yang mendukung kelancaran operasional dan meminimalkan potensi kesalahan administrasi. Dukungan tersebut berkontribusi terhadap kesiapan teknis penyelenggaraan pemilu, sehingga memperkuat kualitas pelayanan demokrasi kepada masyarakat.



Gambar 3. Pelipatan Kertas Suara Pilkada Serentak Tahun 2024

Secara keseluruhan, rangkaian kegiatan menunjukkan adanya peningkatan efektivitas kerja, kerapian administrasi, serta efisiensi pengelolaan dokumen di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pelalawan. Kehadiran mahasiswa tidak hanya membantu penyelesaian tugas rutin, tetapi juga berperan sebagai pendamping administratif yang

memperkuat kapasitas organisasi secara nyata. Selain perubahan yang terlihat pada indikator kinerja administratif, hasil wawancara menunjukkan bahwa pegawai merasakan manfaat langsung dari kehadiran mahasiswa magang. Sebagian besar informan menyatakan bahwa sistem pengarsipan menjadi lebih jelas dan proses pencarian dokumen jauh lebih cepat dibandingkan dengan sebelum pendampingan. Seorang pejabat struktural menyatakan bahwa “Sekarang alur dokumen lebih tertata. Kami tidak lagi bergantung pada ingatan masing-masing pegawai karena sudah ada indeks dan pengelompokan arsip.” Staf administrasi lainnya menambahkan bahwa digitalisasi data sangat membantu dalam proses pelaporan serta memudahkan penelusuran kembali ketika dibutuhkan. Secara umum, mitra menilai program magang memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan ketertiban kerja dan efisiensi pelayanan.

Pembahasan

Hasil kegiatan menunjukkan bahwa pendampingan administratif melalui program magang memberikan implikasi nyata terhadap penguatan tata kelola organisasi publik, baik pada level prosedural maupun pada level perilaku kerja aparatur. Perubahan tidak hanya terlihat pada meningkatnya keteraturan dokumen, tetapi juga pada transformasi cara pegawai memahami pentingnya standar administrasi sebagai bagian dari kualitas pelayanan. Penataan registrasi surat dan arsip yang dilakukan melalui sistem klasifikasi, penyusunan indeks, serta pengelompokan dokumen prioritas terbukti memperpendek rantai birokrasi internal. Sebelum pendampingan, proses penelusuran dokumen sering bergantung pada ingatan personal pegawai, sehingga berisiko menimbulkan keterlambatan ketika petugas yang bersangkutan tidak berada di tempat. Setelah intervensi, mekanisme pencarian menjadi berbasis sistem, bukan individu. Pergeseran ini menandai perubahan penting dari praktik administratif tradisional menuju tata kelola yang lebih institusional.

Temuan tersebut menguatkan pandangan Denhardt & Denhardt (2019) yang menempatkan sistem informasi dan keteraturan prosedur sebagai fondasi utama efektivitas pelayanan publik. Administrasi yang tertib menciptakan kepastian proses, meminimalkan ambiguitas, serta memungkinkan organisasi merespons kebutuhan masyarakat secara lebih cepat. Selain efisiensi, dampak signifikan terlihat pada aspek akuntabilitas. Ketersediaan arsip yang terstruktur mempermudah penyusunan laporan serta meningkatkan kesiapan ketika dilakukan pemeriksaan internal maupun eksternal. Dengan demikian, pembenahan administratif sederhana dapat menghasilkan efek berantai terhadap transparansi dan legitimasi kelembagaan. Menariknya, capaian ini diperoleh tanpa investasi teknologi tinggi, melainkan melalui optimalisasi praktik kerja, disiplin pencatatan, dan pendampingan intensif.

Pada pengelolaan data keuangan partai politik, digitalisasi yang dilakukan mahasiswa memperlihatkan bahwa inovasi berbasis sumber daya manusia mampu mempercepat proses validasi informasi. Data yang sebelumnya tersebar dan tidak seragam menjadi lebih mudah diverifikasi. Kondisi ini mengurangi potensi kesalahan sekaligus mempercepat proses pengambilan keputusan. Dibandingkan dengan banyak program reformasi birokrasi yang berfokus pada pembelian aplikasi, hasil kegiatan ini menunjukkan bahwa perubahan perilaku administratif sering kali lebih menentukan dibandingkan dengan teknologi itu sendiri. Jika dibandingkan dengan berbagai kegiatan pengabdian yang menempatkan mahasiswa sebagai pengamat pasif, model ini relatif berbeda karena mahasiswa berperan sebagai bagian dari proses produksi administrasi. Keterlibatan langsung tersebut menciptakan transfer pengetahuan dua arah: mahasiswa memahami praktik birokrasi riil, sementara pegawai memperoleh alternatif cara kerja yang lebih sistematis. Interaksi ini menjadi faktor kunci munculnya perubahan yang bertahan setelah program selesai.

Keterlibatan mahasiswa dalam dukungan logistik pemilihan kepala daerah juga memperluas makna kontribusi magang. Mahasiswa tidak hanya membantu pekerjaan rutin, tetapi juga ikut memperkuat kesiapan institusi dalam menjalankan fungsi demokrasi lokal. Hal ini menunjukkan bahwa intervensi administratif memiliki implikasi strategis karena berkaitan dengan kelancaran layanan publik yang berdampak luas pada masyarakat. Dari perspektif pendidikan tinggi, program ini menegaskan keberadaan manfaat ganda (*dual benefit*). Mahasiswa memperoleh pengalaman profesional yang otentik, sementara instansi mendapatkan dukungan peningkatan kapasitas. Namun demikian, efektivitas program sangat dipengaruhi oleh keterbukaan pegawai terhadap perubahan. Pada beberapa situasi masih ditemukan kecenderungan kembali pada kebiasaan lama, terutama ketika beban kerja meningkat. Fakta ini menunjukkan bahwa keberlanjutan reformasi administrasi memerlukan komitmen organisasi, bukan hanya intervensi sementara.

Secara keseluruhan, temuan memperlihatkan bahwa magang mahasiswa dapat menjadi model pengabdian masyarakat yang efektif dalam memperkuat tata kelola administrasi publik apabila dirancang berbasis kebutuhan nyata mitra, memiliki indikator kinerja yang jelas, serta disertai pendampingan yang konsisten. Model ini memiliki potensi replikasi pada instansi pemerintah daerah lainnya, terutama bagi organisasi yang menghadapi keterbatasan sumber daya namun membutuhkan peningkatan efisiensi dan akuntabilitas secara cepat. Kebaruan dari model ini terletak pada penempatan mahasiswa sebagai pelaku langsung dalam proses produksi administrasi, bukan sekadar observator pembelajaran. Pendekatan ini memungkinkan munculnya dampak organisasi yang terukur dalam waktu relatif singkat. Model ini menunjukkan bahwa intervensi berbasis kolaborasi sederhana mampu menghasilkan reformasi administratif yang cepat dan terukur.

KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian masyarakat melalui magang mahasiswa yang dilaksanakan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pelalawan menunjukkan kontribusi nyata terhadap penguatan tata kelola administrasi publik. Pendampingan administratif berdampak pada meningkatnya kerapian arsip, ketertiban registrasi surat-menyurat, akurasi pengolahan data, serta efisiensi proses kerja instansi. Perbaikan tersebut berimplikasi langsung pada meningkatnya efektivitas pelayanan sekaligus memperkuat transparansi dan akuntabilitas kelembagaan. Temuan ini menegaskan bahwa magang mahasiswa tidak hanya berfungsi sebagai sarana pembelajaran akademik, tetapi dapat dikembangkan sebagai model pengabdian masyarakat berbasis pendampingan operasional yang aplikatif. Integrasi antara keterlibatan mahasiswa dan kebutuhan riil instansi menghasilkan manfaat ganda, yaitu peningkatan kompetensi profesional mahasiswa dan penguatan kapasitas organisasi mitra. Dengan desain intervensi yang sederhana namun terarah, perubahan administratif dapat dicapai tanpa ketergantungan pada teknologi yang kompleks.

Secara praktis, hasil kegiatan merekomendasikan agar instansi mempertahankan sistem klasifikasi arsip dan mekanisme pencatatan yang telah dibangun, menyusun standar operasional prosedur tertulis, serta menugaskan personel khusus untuk menjaga keberlanjutan praktik administrasi yang telah diperbaiki. Perguruan tinggi juga disarankan mengembangkan pola pendampingan berkelanjutan melalui siklus magang periodik agar proses transfer pengetahuan tetap berlangsung. Meskipun demikian, kegiatan ini memiliki sejumlah keterbatasan. Pertama, durasi pendampingan yang relatif singkat menyebabkan belum seluruh unit kerja dapat disentuh secara optimal. Kedua, pengukuran dampak masih berfokus pada indikator administratif jangka pendek dan belum mampu menilai pengaruh jangka panjang terhadap kinerja organisasi. Ketiga, keberlanjutan perubahan sangat bergantung pada komitmen internal pegawai setelah mahasiswa menyelesaikan masa magang. Oleh karena itu, penelitian dan program lanjutan

diperlukan untuk memastikan konsistensi implementasi serta memperluas cakupan perbaikan. Secara keseluruhan, model magang berbasis pengabdian ini memiliki potensi replikasi pada instansi pemerintah daerah lainnya sebagai strategi kolaboratif dalam meningkatkan kualitas administrasi dan pelayanan publik, terutama bagi organisasi yang menghadapi keterbatasan sumber daya namun membutuhkan peningkatan efektivitas secara cepat.

DAFTAR PUSTAKA

- Armstrong, M. (2020). *Armstrong's handbook of human resource management practice* (15th ed.). London: Kogan Page.
- Budiardjo, M. (2019). *Dasar-dasar ilmu politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Denhardt, J. V., & Denhardt, R. B. (2019). *The new public service: Serving, not steering* (4th ed.). New York: Routledge.
- Dwiyanto, A. (2020). *Reformasi birokrasi dan pelayanan publik di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Etzkowitz, H., & Zhou, C. (2021). *The triple helix: University–industry–government innovation and entrepreneurship*. London: Routledge.
- Fahmi, I., & Yusuf, M. (2022). Peran program magang dalam meningkatkan kompetensi mahasiswa dan kinerja instansi mitra. *Jurnal Pendidikan dan Pengabdian Masyarakat*, 5(2), 134–142.
- Grindle, M. S. (2018). *Politics and policy implementation in the third world*. Princeton: Princeton University Press.
- Halim, A., & Kusufi, M. S. (2020). *Akuntansi sektor publik: Akuntansi keuangan daerah* (7th ed.). Jakarta: Salemba Empat.
- Kolb, D. A. (2019). *Experiential learning: Experience as the source of learning and development* (2nd ed.). New Jersey: Pearson Education.
- Permendikbud Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- Rahman, A., Sari, D. P., & Hidayat, R. (2021). Pengabdian masyarakat berbasis magang mahasiswa pada instansi pemerintah daerah. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(1), 45–54.
- Sedarmayanti. (2021). *Good governance: Kepemerintahan yang baik dalam rangka otonomi daerah*. Bandung: Mandar Maju.
- Suharto, E. (2020). *Membangun masyarakat memberdayakan rakyat*. Bandung: Refika Aditama.
- Sutrisno, E. (2021). Pengabdian masyarakat berbasis kemitraan perguruan tinggi dan pemerintah daerah. *Jurnal Abdimas*, 3(2), 101–109.
- United Nations Development Programme. (2019). *Governance for sustainable development*. New York: UNDP.